

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ahmad Mustanir, Darmiah
Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang
Email: ahmadmustanir74@gmail.com

Abstract

Implementation of the Village Fund and Community Participation in Development in Rural District of Tellu Limpoe Teteaji Sidenreng Rappang. The purpose of research is to determine the Village Fund Policy Implementation in Rural Development in the District Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang and to determine the Community Participation in Rural Development in the District Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang. The population of this study of 2,265 people, while the sample using the formula slovin is numbered 96 people. Techniques of data collection are (1) observation, (2) Interviews (3) of Library Studies and (4) questionnaire. The data was analyzed using frequency tables and percentages. The results of this study indicate that the Village Fund Policy Implementation indicator with a value of 69.78% both categories, Public Participation indicator with a value of 67.2% to the category of good, Rural Development Indicators in the District Teteaji Tellu Limpoe Sidenreng Rappang with a value of 71.4% categorized good.

Keyword: *Community Participation, Development, Policy Implementation*

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan pemerintah tentang desa nomor 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju development community yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independen community sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat, dan apabila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia¹. Mengenai pembangunan desa dengan adanya perubahan struktur masyarakat, maka dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat berarti memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya dengan pemahaman seperti ini, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

¹Istianto, *“Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik”* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h.2

kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yg bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Selain itu, pembangunan di Desa Teteaji belum maksimal dilaksanakan dari usulan masyarakat atau belum termasuk kategori pembangunan partisipatif sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Kebijakan dalam definisi yang mashur menurut Dye adalah *whatever government choose to do or not to do*. Maksudnya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Dye dalam Indiahono menguraikan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*². Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program³. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan

² Lihat Dye dalam Dwiyanto Indiahono, “*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*”, (Yogyakarta : Gava Media, 2009), h. 17

³Lihat Gordon dalam Keban, “*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*”,(Yogyakarta:Gava Media, 2008), h.76

hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan⁴.

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster Wahab, (2005) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implementasi, maka pada bagian ini beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini.

Menurut memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3) disposisi /sikap (disposition/ attitude), (4) stuktur birokrasi (bureaucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain⁵:

⁴Lihat Udoji dalam Leo Agustino, “*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*”, (Bandung: Alfabeta. 2006)

⁵Lihat Edward III dalam Jamaladdin Ahmad, “*Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*”, (Makassar: UNM, 2011),h.84

- a. Komunikasi (communication) : Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula;
- b. Sumberdaya (resources) : Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana;
- c. Disposisi atau Sikap (dipotition/attitude) : Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap/respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.
- d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) : Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Indikator Partisipasi Masyarakat menurut Mubyarto adalah:

- a) Terlibat memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan
- b) Musyawarah perencanaan pembangunan
- c) Pelaksana hasil perencanaan pembangunan
- d) Kesiediaan membayar iuran sebagai dana swadaya
- e) Kesiediaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen.

Berdasarkan Tujuan kebijakan dana desa di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh suatu hasil yang dapat menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang Tujuan kebijakan dana desa di Desa Teteaji adalah 10 orang (10,42 %) responden menjawab sangat baik, 70 orang (72,92 %) responden menjawab baik, 16 orang (16,67 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Pembahasan

Selanjutnya hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang sasaran kebijakan dana desa di Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang sasaran kebijakan dana desa di Desa Teteaji adalah 6 orang (6,25 %) responden menjawab sangat baik, 71 orang (73,96 %) responden menjawab baik, 19 orang (19,79 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Selanjutnya hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang sumber daya terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden sumber daya terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji adalah 9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 69 orang (71,88 %) responden menjawab baik, 18 orang (18,75 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian Tanggapan Responden tentang komunikasi antar organisasi terhadap program pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang komunikasi antar organisasi terhadap program pembangunan di Desa Teteaji adalah 21 orang (21,88 %) responden menjawab sangat baik, 39 orang (40,63 %) responden menjawab baik, 36 orang (37,5 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang karakteristik agen pelaksana terhadap program pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang karakteristik agen pelaksana terhadap program pembangunan di Desa Teteaji adalah 9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 42 orang (43,75 %) responden menjawab baik, 45 orang (46,88 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan di Desa

Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan ekonomi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji adalah 7 orang (7,29 %) responden menjawab sangat baik, 53 orang (55,21 %) responden menjawab baik, 36 orang (37,5 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan sosial masyarakat terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan sosial masyarakat terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji adalah 11 orang (11,46 %) responden menjawab sangat baik, 54 orang (56,25 %) responden menjawab baik, 31 orang (32,29 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang Tanggapan Responden tentang dukungan politik masyarakat terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang dukungan politik masyarakat terhadap peningkatan pembangunan di Desa Teteaji adalah 13 orang (13,54 %) responden menjawab sangat baik, 43 orang (44,79 %) responden menjawab baik, 40 orang (41,67 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang sikap para pelaksana terhadap program pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang sikap para pelaksana terhadap program pembangunan di Desa Teteaji adalah 9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 53 orang (55,21 %) responden menjawab baik, 34 orang (35,42 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Rekapitulasi indikator implementasi kebijakan dana desa yaitu 69,78 % yang berdasarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan indikator di atas.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat terlibat memikul tanggung jawab pelaksanaan

pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat terlibat memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan di Desa Teteaji adalah 21 orang (21,88 %) responden menjawab sangat baik, 39 orang (40,63 %) responden menjawab baik, 36 orang (37,5 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Teteaji adalah 9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 42 orang (43,75 %) responden menjawab baik, 45 orang (46,88 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan-hasil perencanaan pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hasil perencanaan pembangunan di Desa Teteaji adalah 7 orang (7,29 %) responden menjawab sangat baik, 53 orang (55,21 %) responden menjawab baik, 36 orang (37,5 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang Kesiediaan masyarakat membayar iuran sebagai dana swadaya di Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang Kesiediaan masyarakat membayar iuran sebagai dana swadaya di Desa Teteaji adalah 11 orang (11,46 %) responden menjawab sangat baik, 54 orang (56,25 %) responden menjawab baik, 31 orang (32,29 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menggambarkan Tanggapan Responden tentang Kesiediaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen di Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang Kesiediaan

masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen di Desa Teteaji adalah 13 orang (13,54 %) responden menjawab sangat baik, 43 orang (44,79 %) responden menjawab baik, 40 orang (41,67 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Rekapitulasi indikator partisipasi masyarakat yaitu 68,4 % yang berdasarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan indikator di atas.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang keterpaduan antara pelaku pembangunan terhadap partisipasi masyarakat Desa Teteaji menunjukkan Tanggapan Responden tentang keterpaduan antara pelaku pembangunan terhadap partisipasi masyarakat Desa Teteaji adalah 9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 53 orang (55,21 %) responden menjawab baik, 34 orang (35,42 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa Teteaji adalah 10 orang (10,42 %) responden menjawab sangat baik, 70 orang (72,92 %) responden menjawab baik, 16 orang (16,67 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teteaji adalah 6 orang (6,25 %) responden menjawab sangat baik, 71 orang (73,96 %) responden menjawab baik, 19 orang (19,79 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan Tanggapan Responden tentang optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Teteaji menunjukkan bahwa Tanggapan Responden optimalisasi perencanaan pembangunan di Desa Teteaji

adalah 9 orang (9,38 %) responden menjawab sangat baik, 69 orang (71,88 %) responden menjawab baik, 18 orang (18,75 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Hasil penelitian yang Tanggapan Responden tentang sumber daya (dana dan tenaga) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Teteaji menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sumber daya (dana dan tenaga) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Teteaji adalah 21 orang (21,88 %) responden menjawab sangat baik, 39 orang (40,63 %) responden menjawab baik, 36 orang (37,5 %) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik.

Rekapitulasi indikator peningkatan pembangunan Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu 71,4 % dengan kategori baik.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian serta pembahasan pada bab terdahulu maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan dana Desa dengan nilai 69,78 % kategori baik.
2. Partisipasi masyarakat dengan nilai 68,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik.
3. Pembangunan desa dengan nilai 71,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*, UNM, Makassar.
- Adisasmita, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Garaha. Ilmu. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. ed. Rev. IV. Rineka Cipta. Yogyakarta.

Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Eko, Sutoyo. 2008. *Manifesto Pembaharuan Desa*. APMD Press. Yogyakarta.

Gaffar, Afan. 2009. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Alumni. Bandung.

Hetifah, Sj Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press . Depok.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.

Istianto. 2009. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Juliantara, 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Pembaruan*. Yogyakarta

Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media. Yogyakarta.

Dokumen:

Laporan Penduduk Desa Teteaji Tahun 2015

Peraturan Desa Teteaji Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2015

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa